

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Philipus Maximus Jemadu
Jabatan : Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi
Nusa Tenggara Timur
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mokhammad Najih
Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, Januari 2026

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Mokhammad Najih

PLT. KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Philipus Maximus Jemadu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	166 Laporan
	Jumlah laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik	1 Laporan
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah pemerintah daerah yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	23 Pemerintah Daerah
Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahtangaan yang Berkualitas	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
I	Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	
A	Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	
1	Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	Rp 348.312.000
2	Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI yang Bersifat Tematik dan Selektif Khusus Program Prioritas Presiden	Rp 53.996.000
B	Pencegahan Maladministrasi	
1	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Rp 364.603.000
II	Dukungan Manajemen	
A	Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtangaan	
1	Layanan Perkantoran	Rp 244.852.000
	Total	Rp 1.011.763.000

Kupang, Januari 2026

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Mokhammad Najih

PLT. KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Philipus Maximus Jemadu



**DESKRIPSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	166 Laporan	Merupakan keluaran atas kegiatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat. Laporan yang dimaksud adalah laporan masyarakat yang diselesaikan (ditutup) pada tahun 2026 di tahap PVL yang tidak memenuhi syarat materil (tidak termasuk penutupan karena tidak memenuhi syarat formil) dan tahap pemeriksaan. Laporan yang diselesaikan merupakan penyelesaian (penutupan) laporan yang ditangani pada tahun	Data SIMPeL	Dihitung dengan menjumlahkan seluruh laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang diselesaikan (ditutup) pada tahun 2026 (laporan yang diterima pada tahun 2026 dan laporan register tahun sebelumnya yang belum ditutup/ <i>backlog</i>). $\sum LMS = LMS_1 + LMS_2 + \dots + LMS_n$ $\sum LMS$: Jumlah laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang diselesaikan (ditutup) LMS : Laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang diselesaikan (ditutup) pada tahun 2026 (laporan yang

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
			2026 (laporan yang diterima pada tahun 2026 dan laporan register tahun sebelumnya yang belum ditutup/ <i>backlog</i>).		diterima pada tahun 2026 dan laporan register tahun sebelumnya yang belum ditutup/ <i>backlog</i>).
	Jumlah laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik	1 Laporan	Merupakan keluaran atas kegiatan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS). Laporan yang dimaksud adalah laporan pengawasan Ombudsman melalui investigasi atas prakarsa sendiri pada tahun 2026 bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik.	Laporan IAPS	Dihitung berdasarkan jumlah laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) pada tahun 2026 bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah pemerintah daerah yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	23 Pemerintah Daerah	Merupakan keluaran atas kegiatan penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah.	Laporan Hasil Penilaian Opini	Dihitung dengan menjumlah seluruh Pemerintah Daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik meliputi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menjadi lokus penilaian opini

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
			Pemerintah Daerah yang dinilai meliputi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menjadi lokus penilaian opini.		$\sum PDOP = PDOP_1 + PDOP_2 + \dots + PDOP_n$ $\sum PDOP$: Jumlah Pemerintah Daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik $PDOP$: Pemerintah Daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan	Merupakan keluaran atas kegiatan layanan perkantoran untuk memastikan operasional dan pemeliharaan kantor dapat terpenuhi selama 1 tahun.	Data penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	Dihitung berdasarkan layanan operasional dan pemeliharaan kantor perwakilan yang diberikan